



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG KEPEMUDAAN
KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 9 S.D. 11 FEBRUARI 2023**

I. PENDAHULUAN

Peta jalan bidang kepemudaan untuk mewujudkan Visi 2045 akan menghadapi banyak tantangan. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelaksanaan berbagai program kegiatan kepemudaan, termasuk bidang kewirausahaan, kepemimpinan pemuda dan sarpras kepemudaan, serta upaya Kemenpora untuk membuat DBPN, perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, dalam Rapat Intern Komisi X DPR RI pada tanggal 10 Januari 2023, menyepakati melakukan kunjungan kerja spesifik bidang kepemudaan. Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI dilakukan untuk mendapatkan masukan yang konstruktif secara langsung dari pemangku kepentingan dan para pemuda di berbagai daerah, terkait pelaksanaan berbagai kepemudaan dan masukan bagi penyusunan DBKN oleh Pemerintah. Komisi X DPR RI akan melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan ini ke Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31.
2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 98 ayat (3) huruf a dan d.
4. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
8. Kesimpulan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 10 Januari 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Melakukan komunikasi intens, menggali, menyerap aspirasi, dan mendapatkan data faktual dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan bidang pemuda di daerah, terkait dengan pelaksanaan kegiatan kepemudaan.

C. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Sumatera Barat dipimpin oleh H. Muhammad Nur Purnamasidi dari Fraksi Partai Golongan Karya. Turut hadir mendampingi kunjungan kerja Komisi X yaitu Drs. Edi Nurinda Susila, M.Si. selaku Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, Kemenpora RI. Tim ini juga didampingi Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

D. Jadwal Kunjungan Kerja

Pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Hansastri, AK, MM. yang dihadiri oleh Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Sumatera Barat, Gusti Anola, Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Sumatera Barat, Dewita Murni, Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Sumatera Barat, serta Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Provinsi Sumatera Barat (Pramuka Kwartir Daerah Sumatera Barat, Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat, Garda Pemuda Nasional Demokrat).

II. ISI LAPORAN

A. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan data tertulis yang disampaikan oleh Dispora Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa potensi maupun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan bidang kepemudaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Jumlah pemuda di Provinsi Sumatera lebih kurang 2.15 juta orang atau 24.57% dari jumlah penduduk Sumatera Barat yang tersebar di daerah kabupaten dan kota. Jumlah organisasi kepemudaan di Provinsi Sumatera Barat saat ini berjumlah 63 organisasi pemuda yang terhimpun dalam DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat. Minat pemuda dalam berorganisasi masih rendah. Pemuda yang terhimpun dalam organisasi adalah lebih kepada pemuda yang berasal dari kelompok pendidikan.
2. Rendahnya minat pemuda di Provinsi Sumatera Barat untuk berorganisasi salah satu faktor adalah lebih banyak usia pemuda yang lebih fokus kepada wirausaha. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada pemuda yang dilaksanakan tentang manfaat dan pentingnya berorganisasi. Adapun faktor yang membuat organisasi di Sumatera Barat kurang terlihat aktifitasnya adalah sarana dan prasarana yang sangat minim, sehingga ada ruang keterbatasan organisasi dalam menjalankan program program kerja serta tidak adanya dukungan terhadap organisasi yang secara berkesinambungan. Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan: Gedung Pemuda 1 unit, dan Pondok Pemuda di Lubuk Selasih 1 unit.
3. Program Kepemudaan pada bidang pemberdayaan pemuda:

Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Keterangan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan	Peningkatan kreativitas pemuda	Program Unggulan
	Peningkatan Iptek Pemuda Progul	Program Unggulan

Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	PPAN	Mandatori (Nasional)
	PPAP	Mandatori (Nasional)
	Pekan Kreativitas Pemuda (PKPI)	Mandatori (Nasional)
	Pendidikan Bela Negara	Kerja sama dengan Korem & Forum Bela Negara
	Napak tilas Bela Negara	Program Gubernur
	Peningkatan kreativitas pemuda (Pidato adat)	ABS-SBK Pemuda
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Pembangunan kepemudaan
	Peningkatan Sumber Daya Kepemudaan (PCB)	Kerja sama dengan KPK RI
	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Pembangunan kepemudaan
	Pertukaran Pemuda Sumbar-Malaysia	Mengembangkan pemuda Sumbar untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta etos kerja internasional sekaligus untuk mempersiapkannya menghadapi tantangan global di masa mendatang. Mendukung Program Unggulan.
	Kapal Pemuda Minang (KPM) Sail Mentawai	Memperkenalkan keindahan alam dan budaya Sumatera Barat berupa potensi kekayaan sumber daya kelautan, sektor industri dan jasa maritim dan wirausaha berbasis kelautan kepada para pemuda. Kerjasama dengan TNI AL.
Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi.	(Lomba Inovasi Iptek)	

4. Rencana Program Kepemudaan Tahun 2024 pada bidang Pengembangan Pemuda:

Sub Kegiatan	Bentuk kegiatan	Pagu Dana	Peserta	Keterangan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi dan Nasional.	255.000.000	35 orang	Nasional
Koordinasi, Sinkronisasi dan	Pelatihan Kewirausahaan	1.200.000.000	390 orang	Program Unggulan

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	dan Pelatihan Digital Marketing			
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda	Pelatihan Kepemimpinan	235.000.000	120 orang	Pengembangan SDM Kepemudaan
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP)	300.000.000	100 orang Pemuda	Peningkatan SDM Organisasi Pemuda
JUMLAH		1.990.000.000	645 orang	

5. Rencana Program Kepramukaan:

Sub Kegiatan	Bentuk kegiatan	Pagu Dana	Peserta	Keterangan
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Gelar Karya Pramuka dan Jambore Daerah	841.671.000	380 orang	Peningkatan SDM Kepramukaan
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Pelatihan KPD, KPL dan KML	300.000.000	150 orang	Peningkatan SDM Kepramukaan
JUMLAH		1.141.671.000	530 orang	

6. Pengalokasian anggaran pembangunan kepemudaan pada 5 tahun terakhir adalah: pada tahun 2019 adalah sebesar (Rp.4.597.023.031), 2020 sebesar (Rp.1.401.667.241), 2021 sebesar (Rp.4.926.631.800), 2022 sebesar (Rp. 8.007.499.965) dan pada tahun 2023 sebesar (Rp. 11.180.727.600).
7. Dukungan anggaran kepemudaan sangat mempengaruhi keberhasilan pemenuhan pembangunan Kepemudaan. Pada tahun 2020 semenjak *pandemi covid 19*, penganggaran yang sudah dilakukan tidak dapat diserap, dikarenakan pembatasan pelaksanaan kegiatan. Anggaran yang sudah tersedia dialihkan untuk penanganan covid-19. Adapun proses dan pelaksanaan program kegiatan kewirausahaan pemuda pada saat pandemi melanda tidak bisa dijalankan dengan optimal. Adanya pembatasan pembatasan sosial membuat pelaksanaan baik pelatihan kewirausahaan maupun kegiatan wirausaha itu sendiri tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 2020 Dispora Sumbar tidak berhasil dalam mencapai target pelayanan kepemudaan.
8. Semenjak pandemi *covid-19*, kegiatan pembangunan kepemudaan di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya sangat terganggu. Kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha membuat banyaknya munculnya masalah masalah baru terutama angka

pengangguran yang bertambah, dimana masih banyak pemuda yang belum siap dan memiliki keterampilan dalam berwirausaha, sehingga banyak wirausaha yang gulung tikar karena belum memiliki strategi strategi untuk terus mengembangkan usahanya ditengah pandemi *covid-19*.

9. Untuk anggaran 2021 seluruh kegiatan kepemudaan sudah bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tentunya dalam hal ini kembali memberikan pelayanan kepemudaan dengan melaksanakan kegiatan kegiatan pembekalan dan pelatihan bagi pemuda dan dalam rangka mencapai target pembangunan kepemudaan. Tahun 2022, seluruh kegiatan pelayanan kepemudaan sudah bisa dilaksanakan dengan maksimal, dan target pembangunan kepemudaan bisa dicapai, dimana dari setiap indikator pelayanan kepemudaan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tentunya mencapai target yang diharapkan.
10. Strategi kebijakan pengembangan kewirausahaan berdasarkan RPJMD 2021-2026 diantaranya: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing. Kemudian meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, membuat program unggulan yang salah satunya adalah “Mencetak 100 ribu millenial *entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif”, dalam upaya mencapai Sumbar sejahtera. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, turut serta dalam menyukseskan program unggulan tersebut dengan melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk wirausaha muda. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maka pengembangan kewirausahaan pemuda menjadi sangat penting dan strategis.
11. Agenda “Mencetak 100 ribu millenial *entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif”, dilakukan pelatihan pelatihan diantaranya pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha muda Sumatera Barat, pelatihan digital marketing dan pelatihan manajemen ekspor, dengan tujuan Meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi pemuda dalam mengembangkan usaha mandiri yang berbasis pada keunggulan lokal. Dari itu juga dikembangkan daya saing dalam hal mutu, harga dan ketepatan waktu, sehingga dapat memperluas jaringan usaha dan sebaran penjualan atau pasar sebagai dampak dari pengelolaan tersebut kapasitas produksi dapat ditingkatkan. Mendorong berkembangnya usaha masyarakat yang terfokus dan terintegrasi antara potensi wilayah dan pasar secara berkelanjutan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
12. Pengembangan kewirausahaan pemuda juga sejalan dengan upaya meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta meningkatkan semangat berkoperasi bagi pemuda. Banyak pelaku UMKM adalah kalangan pemuda yang harus terus didampingi agar mereka dapat “naik kelas” menjadi pengusaha nasional yang mampu bersaing dengan pengusaha negara lain. Salah satu upaya peningkatan daya saing pengusaha pemuda itu adalah pengembangan inkubasi bisnis terutama inkubasi bisnis yang bekerjasama dengan perguruan tinggi.

13. Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan menjadi amat penting dan strategis, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Agenda pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan salah satu agenda penting dalam koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan, karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan faktual bangsa Indonesia dewasa ini yakni pentingnya penumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional.
14. Kunci keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan adalah dengan strategi pencapaian program melalui pendekatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) yang baik. Dispora Sumbar, rutin melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun yang diselenggarakan pada triwulan pertama, dimana dalam pertemuan ini adalah dalam rangka penyamaan persepsi, program kerja dan strategi yang akan dilakukan untuk pembangunan kepemudaan, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2023, Rapat Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota akan dilakukan pada tanggal 13 - 14 Februari 2023 mendatang. Dalam rakor ini akan dikupas faktor penghambat maupun isu strategis, faktor pendorong maupun langkah-langkah dalam mencapai target dan tujuan pembangunan kepemudaan. Penyamaan persepsi dan kesesuaian antara program kerja yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun pemerintah Daerah juga akan dibahas.

B. Temuan dan Pembahasan

Dalam diskusi bersama Dispora Sumbar dan para pemuda Sumbar, terdapat beberapa hal yang menjadi masukan penting, antara lain sebagai berikut:

1. Kabid Pengembangan Pemuda Gusti Anola dan Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Sumatera Barat, Dewita Murni. menyampaikan beberapa masukan antara lain:
 - a. Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat telah memfasilitasi berbagai kegiatan kepemudaan dan pramuka. Beberapa program unggulan telah dilaksanakan, terutama pasca Pandemi ini, mengingat selama pandemi, kegiatan kepemudaan banyak terhambat/tertunda. Kegiatan unggulan, diantaranya “Mencetak 100 ribu millenial *entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif”, dilakukan pelatihan pelatihan diantaranya pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha muda Sumatera Barat.
 - b. Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota yang bidang kepemudaannya digabung atau tersebar di berbagai dinas, seperti dinas pariwisata, dinas pendidikan maupun dinas olahraga. Kepemudaan tidak menjadi dinas tersendiri, sehingga sebagian besar penanganan kepemudaan tidak menjadi prioritas pemerintah daerah. Hal ini juga menjadi kesulitan kami dalam mengembangkan koordinasi di bidang kepemudaan.

- c. Paskibraka yang selama ini ditangani Dinas Pemuda dan Olahraga, dipindah ke Kesbangpol, karena di pusat juga dipindah ke BPIP. Ini sempat membuat kebingungan, mengingat sebagian besar, Paskibraka masih ditangani Dinas Pemuda dan Olahraga di masing-masing Kab/Kota. Perubahan penanganan Paskibraka ini sempat terkendala anggaran. Mudah-mudahan, penanganan Paskibraka oleh Kesbangpol dapat berjalan baik dan tidak dianaktirikan.
 - d. Indeks Pengembangan Pemuda sangat tergantung pada pelaksanaan Grand Desain Kepemudaan, Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah. Pandemi Covid-19 yang lalu memang dirasakan sangat menghambat perkembangan berbagai kegiatan bidang kepemudaan.
 - e. Anggaran bidang kepemudaan memang menjadi kendala. Jika UU Kepemudaan direvisi, kami mengusulkan agar ada prosentase tersendiri untuk anggaran bidang kepemudaan. Tahun-tahun sebelumnya, sempat ada dana dekonsentrasi bidang kepemudaan, namun kini tidak ada lagi.
 - f. Untuk kegiatan bidang kepemimpinan, kami Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan kegiatan yang melibatkan KPK, dan diminati oleh banyak pemuda di Sumatera Barat.
2. Dewan Kerja Kwartir Daerah Pramuka Sumatera Barat, diantaranya melalui Fahrur Razi, menyampaikan beberapa masukan antara lain:
- a. Dewan kerja Kwarda Pramuka Sumatera Barat terdiri dari 17 orang. Dan telah melakukan berbagai kegiatan di bidang kepramukaan yang fokus di kegiatan pengembangan karakter pemuda di kab/kota. Kendalanya adalah fasilitas gerakan pramuka, anggaran kurang, dan tidak setiap kab/kota memiliki anggota Pramuka.
 - b. Usia muda dalam kenyataannya banyak yang belum dapat menyalurkan bakat dan minatnya akibat fasilitas dan sarana yang tidak memadai, pengaruh globalisasi yang kuat, hingga kendala adaptasi dalam mengeksplorasi jati dirinya. Kami mengusulkan agar kegiatan MBKM yang kami rasa baik, dapat lebih disosialisasikan kepada kami sehingga kami dapat mengikutinya, karena kenyataannya kami belum mendapatkan program tersebut.
 - c. Pemuda di nagari (desa) juga memiliki bakat dan minat yang banyak, namun tidak memiliki fasilitas dan anggaran. Di nagari, banyak pemuda yang tergabung dalam berbagai komunitas namun tidak memiliki dukungan yang mampu mengembangkan bakat dan minat mereka. Tidak mampu membayar tenaga ahli yang mampu mendukung pengembangan bakat sebagaimana pemuda-pemuda di kota, dan hanya mengandalkan donator-donatur atau orang tua.
3. Pelajar Islam Indonesia Cabang Sumatera Barat, menyampaikan beberapa masukan antara lain:
- a. Fokus PII adalah kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal ini dilakukan karena banyak pemuda pelajar yang mengalami degradasi intelektual yang ditunjukkan melalui penurunan literasi dan pengetahuan yang makin minim. Dulu banyak pemuda pelajar

- sebagai pegiat buku, kini pegiat gadget. Bahkan bukan hanya literasi yang menurun, akhlak pun juga menurun.
- b. Harapannya adalah, bagaimana agar pemuda mampu memiliki pengetahuan dan literasi sebagaimana dulu, meskipun kenyataannya terdapat banyak kekurangan fasilitas, sarana serta anggaran.
4. Garda Pemuda Nasdem, mengharapkan agar anggaran kepemudaan di Kemenpora yang hanya sekitar 7% sampai 12% dibanding anggaran keolahragaan, diharapkan dinaikkan.
 5. Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora RI, Drs. Edi Nurinda Susila, M.Si. menyampaikan beberapa catatan, diantaranya:
 - a. Deputy II Kemempora fokus pada berbagai kegiatan yang mengarah pada penguatan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan. Anggaran kepemudaan memang minim, namun terdapat 27 K/L lain yang juga menyelenggarakan kegiatan kepemudaan, misalnya dibidang kependidikan dan lain-lain. Ketersebaran anggaran kepemudaan tersebut, tentu dibutuhkan koordinasi yang baik, sehingga seluruhnya digunakan untuk kepemudaan dan tepat sasaran.
 - b. Di Dirjen Pendidikan Luar Sekolah maupun Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, juga terdapat anggaran untuk kepemudaan. Oleh karena itu, dalam rangka koordinasi antar K/L itulah diperlukan grand design kepemudaan yang sedang disusun oleh Kemenpora. Meski anggaran minim, namun saya menghimbau untuk tidak patah semangat dalam melaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan.
 6. Komisi X DPR RI melalui Muhammad Nur Purnamasidi, Putra Nababan, Hj. Himmatul Aliyah, Hj. Lisda Hendrajoni, Hj. Ledia Hanifa, Hj. Sakinah Aljufri, dan Drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si, menyampaikan pandangan antara lain sebagai berikut:
 - a. Banyak kegiatan MBKM yang dapat diikuti. Seperti magang bersertifikat, studi independen, kampus mengajar, Indonesian international student mobility awards (IISMA), pertukaran mahasiswa merdeka, membangun desa (kkn tematik), proyek kemanusiaan dan riset atau penelitian. Meskipun masih banyak kekurangannya, para pemuda/mahasiswa perlu mengakses agar bisa mendapatkan manfaat dari MBKM.
 - b. Anggaran bidang kepemudaan memang sedikit, namun banyak sumber anggaran lain yang bisa dimanfaatkan oleh pemuda dari K/L lainnya. Misalnya dana desa. Jika pemuda kreatif, memiliki usaha, dan lain-lain, yang bisa dikembangkan, bisa menggunakan dana desa. Dinas Pemuda dan Olahraga perlu mendukung untuk hal ini. Dispora perlu menjembatani agar pemuda dapat mengakses anggaran dan kegiatan di K/L lain.
 - c. Aktivitas dan militansi pemuda jaman dulu bisa dijadikan contoh. Pemuda biasanya malah tidak ingin terlalu dekat pemerintah, memiliki solusi sendiri atas permasalahan-permasalahannya.

III. KESIMPULAN

1. Jumlah Pemuda di Provinsi Sumatera lebih kurang 2.15 Juta orang atau 24.57% dari Jumlah penduduk yang tersebar di daerah kabupaten dan Kota. Minat pemuda dalam berorganisasi masih rendah. Pemuda yang terhimpun dalam organisasi adalah lebih kepada pemuda yang berasal dari kelompok pendidikan. Rendahnya minat pemuda di Provinsi Sumatera Barat untuk berorganisasi salah satu faktor adalah lebih banyak usia pemuda yang lebih fokus kepada wirausaha. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada pemuda yang dilaksanakan tentang manfaat dan pentingnya berorganisasi.
2. Faktor yang membuat organisasi di Sumatera Barat kurang terlihat aktifitasnya adalah sarana dan prasarana yang sangat minim, sehingga ada ruang keterbatasan organisasi dalam menjalankan program program kerja serta tidak adanya dukungan terhadap organisasi yang secara berkesinambungan.
3. Pada tahun 2020 semenjak *pandemi covid 19*, penganggaran yang sudah dilakukan tidak dapat diserap, dikarenakan pembatasan pelaksanaan kegiatan. Anggaran yang sudah tersedia dialihkan untuk penanganan covid-19. Adanya pembatasan pembatasan sosial membuat pelaksanaan baik pelatihan kewirausahaan maupun kegiatan wirausaha itu sendiri tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 2020 Dispora Sumbar tidak berhasil dalam mencapai target pelayanan kepemudaan.
4. Tahun 2022, seluruh kegiatan pelayanan kepemudaan sudah bisa dilaksanakan dengan maksimal, dan target pembangunan kepemudaan bisa dicapai, dimana dari setiap indikator pelayanan kepemudaan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tentunya mencapai target yang diharapkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, membuat program unggulan yang salah satunya adalah "Mencetak 100 ribu millennial *entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif", dalam upaya mencapai Sumbar sejahtera.
5. Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota yang bidang kepemudaannya digabung atau tersebar di berbagai dinas, seperti dinas pariwisata, dinas pendidikan maupun dinas olahraga. Kepemudaan tidak menjadi dinas tersendiri, sehingga sebagian besar penanganan kepemudaan tidak menjadi prioritas pemerintah daerah. Hal ini juga menjadi kesulitan Dispora Sumbar dalam mengembangkan koordinasi di bidang kepemudaan.
6. Pramuka, PII dan OKP lain telah melakukan berbagai kegiatan kepemudaan, dengan fokus karakter, pendidikan dan kebudayaan bagi pemuda, serta kegiatan lain untuk menyalurkan bakat dan minat kepemudaan. Namun terdapat kendala seperti anggaran, fasilitas, dan sarpras kepemudaan. Para pemuda mengusulkan kenaikan anggaran kepemudaan agar aktivitas mereka dapat meningkat.

IV. SARAN DAN REKOMENDASI

Terhadap beberapa masukan dan kendala yang dihadapi oleh para pemuda di Provinsi Sumatera Barat, Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan aktivitas dan dukungan bagi kegiatan bidang kepemudaan, antara lain melalui:

1. peningkatan fasilitas, sarana, kegiatan dan anggaran bidang kepemudaan yang didukung oleh *political will* (kemauan politik) yang kuat dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. meningkatkan koordinasi antar lembaga, baik di Pusat maupun Daerah, yang memiliki agenda bidang kepemudaan agar kegiatan kepemudaan dapat lebih sesuai/sinkron.
3. menjembatani para pemuda dengan lembaga lain yang memiliki agenda bidang kepemudaan, agar para pemuda mendapatkan akses yang sesuai dengan kebutuhannya.

V. PENUTUP

Demikian laporan Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR-RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Barat, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 13 Februari 2023

**Ketua Tim/
Anggota Komisi X DPR RI**

Ttd.

H. Muhammad Nur Purnamasidi
A-316